

# **ANALISIS DELIBERATIF TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH DI KECAMATAN PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG**

Oleh:

Vita Dwi Nur Fibrianingsih, Ari Subowo, R. Slamet Santoso.

## **Abstrak**

Kebijakan alokasi dana pembangunan sarana dan prasarana wilayah di Kota Semarang sejalan dengan salah satu prinsip penanggulangan kemiskinan yaitu memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Hanya di Kecamatan Pedurungan yang mengalami jumlah peningkatan kemiskinan padahal alokasi dana pembangunannya meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara deliberatif isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) kebijakan alokasi dana pembangunan sarana prasarana wilayah di Kecamatan Pedurungan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode analisis deliberatif yang menggunakan konsep *Good Governance* sebagai alat analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari kesembilan parameter analisis deliberatif yang memiliki korelasi paling besar adalah prinsip partisipasi. Untuk indikator yang paling banyak berkorelasi dengan prinsip analisis deliberatif adalah letak pengambilan keputusan yang berkorelasi dengan prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, dan akuntabilitas. Sedangkan parameter analisis deliberatif yang berkorelasi terhadap lingkungan implementasi kebijakan alokasi dana pembangunan sarana dan prasarana wilayah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang antara lain *rule of law*, *responsiveness*, dan *strategic vision*. Dari ketiga parameter tersebut yang paling besar berkorelasi adalah prinsip *responsiveness*. Untuk indikator yang paling banyak berkorelasi dengan prinsip analisis deliberatif adalah kepatuhan dan respon pelaksana yang berkorelasi dengan prinsip *rule of law* dan *responsiveness*.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah terdapat tiga faktor pada isi kebijakan dengan kriteria dari analisis deliberatif yang masih lemah pelaksanaannya yaitu partisipasi pada tipe manfaat, transparansi dan akuntabilitas pada letak pengambilan keputusan, serta sumber daya dengan kriteria transparansi dan efisiensi. Rekomendasi yang diberikan ialah mengintensifkan LPMK untuk meningkatkan pengawasan dan adanya upaya standarisasi harga untuk menjamin efisiensi pembangunan.

**Kata kunci: kemiskinan, analisis deliberatif, implementasi, kebijakan alokasi dana pembangunan sarana dan prasarana wilayah**

DELIBERATIVE ANALYSIS FOR IMPLEMENTATION OF POLICY  
FINANCIAL DEVELOPMENT ALLOCATION FOR REGIONAL  
INFRASTRUCTURE IN PEDURUNGAN DISTRICT, SEMARANG CITY

By:

Vita Dwi Nur Fibrianingsih, Ari Subowo, R. Slamet Santoso.

**Abstract**

Fund allocation policy infrastructure development in the area of Semarang in line with one of the principles of poverty reduction is to improve poor people's access to basic services. Only in District Pedurungan experiencing poverty increased amount while the allocation of development funds to increase. The purpose of this study was to analyze the contents of deliberative policy (content of policy) and implementation environment (context of implementation) policy of allocation of funds for development of infrastructure in Sub Pedurungan region. The method used is deliberative analysis method that uses the concept of good governance as an analytical tool.

Results from this study indicate that the deliberative analysis of the nine parameters that have the greatest correlation is the principle of participation. For most indicators correlated with the principle of deliberative analysis is the location of the decision-making correlates with the principles of participation, rule of law, transparency, and accountability. While the deliberative analysis parameters that correlate to the environment fund allocation policy implementation infrastructure development in the district region Pedurungan, Semarang City, among others, the rule of law, responsiveness, dan strategic vision. Of the three parameters most correlated is the principle of responsiveness. For most indicators correlated with the principle of deliberative analysis is compliance and implementing responses were correlated with the principle of rule of law and responsiveness.

The conclusion from this study is that there are three factors on the content of the policy with criteria of deliberative analysis of their implementation is still weak participation on the type of benefit, transparency and accountability on the location of decision making, as well as resources with criteria of transparency and efficiency. Recommendations are given is intensifying LPMK to improve supervision and for the price standardization efforts to ensure the efficiency of development.

**Keywords: poverty, deliberative analysis, implementation, funding allocation policy infrastructure development region**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Prasarana dan sarana kota merupakan kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan suatu wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pembangunan prasarana pada hakekatnya merupakan tugas dan tanggungjawab baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Walaupun demikian, dalam operasionalnya dapat melibatkan peran aktif pihak swasta maupun masyarakat.

Kebijakan Alokasi dana pembangunan sarana dan prasarana wilayah ini sangat penting karena dengan kebijakan ini kebutuhan masyarakat akan pembangunan sarana dan prasarana di wilayahnya dapat terpenuhi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretariat Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program Bappeda Kota Semarang bahwa selama ini, usulan masyarakat dalam musrenbang belum dapat secara keseluruhan diakomodir oleh

pemerintah, karena program pemerintah selama ini hanya berfokus pada pembangunan di Kota Semarang sehingga kebutuhan masyarakat di Kecamatan kurang tersentuh. Padahal, banyak sarana dan prasarana di setiap Kecamatan di Kota Semarang yang masih harus dibangun dan dibiayai.

Awal terbentuknya kebijakan ini yaitu pada tahun 2012 dimana pemerintah Kota Semarang menggalakkan pembangunan sarana prasarana wilayah melalui pengucuran dana yang disebut dengan Dana Eks Kontingensi. Dana Eks Kontingensi adalah salah satu kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penganggaran bantuan yang disampaikan langsung kepada masyarakat, dimana bantuan diberikan langsung kepada masyarakat yang mengajukan proposal permohonan bantuan. Kemudian setelah ada Peraturan Walikota Nomor 38 tahun 2013 Dana Eks Kontingensi tersebut berganti nama menjadi Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana

Wilayah. Perbedaannya ialah bantuan dalam bentuk dana tidak lagi dapat diterima langsung oleh masyarakat melainkan melalui Kecamatan sebagai SKPD. Begitu pula dalam pelaksanaan pembangunan yang melaksanakan adalah pihak Kecamatan dengan pihak ketiga atau Kontraktor sebagai pelaksana pembangunan fisik wilayah.

Pada prinsipnya kebijakan ini sama halnya dengan Alokasi Dana Desa maupun Dana Alokasi Khusus. Perbedaan Alokasi Dana Sarana Prasarana Wilayah dengan ADD ialah ADD diperuntukkan bagi setiap desa di kabupaten di Indonesia, sedangkan Alokasi dana pembangunan sarana dan prasarana wilayah ialah kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Kota Semarang yang diperuntukkan bagi setiap Kelurahan di Kota Semarang.

Berdasarkan Perwal No. 17 tahun 2013 tentang perubahan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah yang dilaksanakan Kecamatan, kebijakan alokasi dana

pembangunan sarana dan prasarana wilayah adalah suatu bentuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang terdapat di wilayah Kecamatan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan yang didanai dengan APBD Kota Semarang. Musrenbang adalah suatu mekanisme perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan

Jenis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah meliputi:

- a. Pembangunan jalan
- b. Pembangunan talud
- c. Pembangunan saluran
- d. Pembangunan balai RT / RW
- e. Pembangunan jembatan
- f. Pembangunan lapangan olahraga
- g. Pembangunan taman
- h. Pembangunan lain yang sejenis

Pembangunan sarana prasarana wilayah yang telah disebutkan di atas memiliki korelasi dengan percepatan penanggulangan

kemiskinan. Karena dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana wilayah, maka hal tersebut akan mampu memudahkan akses masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, mendapatkan akses kesehatan, akses pendidikan, dan akses sanitasi yang baik. Dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana wilayah, maka akses masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dapat tercapai. Dengan mudahnya akses yang diterima masyarakat, maka dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Dengan demikian, maka dapat membantu percepatan penanggulangan kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut, masih ada Kecamatan di Kota Semarang yang justru mengalami peningkatan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Hanya di Kecamatan Pedurungan yang mengalami peningkatan angka kemiskinan tahun 2013. Pada tahun 2011 jumlah kemiskinan di Pedurungan sebesar 22.743 jiwa dan pada tahun 2013

meningkat menjadi 25.695 jiwa. Padahal anggaran alokasi dana pembangunan sarana dan prasarana wilayah di setiap Kecamatan di Kota Semarang meningkat dari tahun ke tahun.

## 1.2. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis isi kebijakan (*content of policy*) dari kebijakan Alokasi Dana Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
2. Menganalisis lingkungan implementasi (*context of implementation*) kebijakan Alokasi Dana Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

## 1.3. Tinjauan Teoritis

### 1.3.1. Analisis Deliberatif

Ada Sembilan karakteristik *Good Governance* (Nugroho, 2007: 124-126), yaitu:

1. *Participation.*
2. *Rule of law.*
3. *Transparency.*
4. *Responsiveness.*
5. *Consensus orientation.*

6. *Accountability*.
7. *Effectiveness and efficiency*.
8. *Equity*.
9. *Strategic vision*.

Teori tersebut diatas oleh Maarten Hajer dan Henderik Wagenaar menyebut dengan *deliberative policy analysis* atau analisis kebijakan deliberatif.

### 1.3.2. Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Pendekatan Merilee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle (dalam Subarsono, 2010: 93) ada 2 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*), mencakup :
  - a. *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)
  - b. *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)
  - c. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)
  - d. *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan

- e. *Program Implementer* (Pelaksana Program)
- f. *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

2. Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*), mencakup :

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan-  
Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)
- b. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)
- c. *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

### 1.4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dalam pemilihan informan yang digunakan teknik

*purposive sampling*, artinya pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh orang-orang yang mengetahui dengan benar tentang masalah yang terkait dengan penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini antara lain:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program Bappeda Kota Semarang yang menjabat pada tahun 2015.
2. Seksi Pembangunan Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang menjabat pada tahun 2015.
3. Seksi Pembangunan Kelurahan Telogosari Kulon, Kota Semarang yang menjabat pada tahun 2015.
4. Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
5. Perwakilan Ketua RW di Kelurahan Telogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
6. Perwakilan Ketua RT di Kelurahan Telogosari Kulon,

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Sumber data berasal dari data primer melalui wawancara, dan data sekunder dari dokumen yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deliberatif. Analisis deliberatif melihat kebijakan dari sudut pandang *Good Governance* dengan meneliti karakteristik *Good Governance* pada kebijakan alokasi dana pembangunan sarana dan prasarana wilayah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Data yang terkumpul akan diinterpretasikan melalui reduksi data yaitu dengan memilih data- data yang penting dan akan digunakan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda.

## **PEMBAHASAN**

1. Analisis Deliberatif terhadap Isi Kebijakan Sarana dan Prasarana Wilayah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang

- a. *Interest Affected*  
(Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi).

Dari sembilan parameter analisis deliberatif, ada tiga yang memiliki korelasi paling kuat yaitu prinsip partisipasi, *consensus orientation*, dan *equity*.

- b. Tipe Manfaat.

Dari sembilan parameter analisis deliberatif, ada dua yang memiliki korelasi paling kuat yaitu prinsip partisipasi, efektifitas dan efisien.

- c. Derajat Perubahan yang ingin Dicapai

Dari sembilan parameter analisis deliberatif, ada dua yang memiliki korelasi paling kuat yaitu prinsip *responsiveness* dan *strategic vision*.

- d. Letak Pengambilan Keputusan

Dari sembilan parameter analisis deliberatif, ada empat yang memiliki korelasi paling kuat yaitu prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, dan akuntabilitas.

- e. Pelaksana Program

Dari sembilan parameter analisis deliberatif, ada dua yang memiliki korelasi paling kuat yaitu prinsip partisipasi dan *rule of law*.

- f. Sumberdaya yang digunakan

Dari sembilan parameter analisis deliberatif, ada dua yang memiliki korelasi paling kuat yaitu prinsip transparansi, efektivitas dan efisien.

## 2. Analisis Deliberatif terhadap Lingkungan Implementasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Wilayah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

Dari sembilan parameter analisis deliberatif, ada satu



yang memiliki korelasi paling kuat yaitu prinsip *responsiveness*.

- b. Karakteristik Rezim yang Berkuasa

Karakter rezim yang berkuasa dilihat dari aspek historis kebijakan dikaitkan dengan prospek pemimpin. Dari sembilan parameter analisis deliberatif, ada dua yang memiliki korelasi paling kuat yaitu prinsip *strategic vision*.

- c. Kepatuhan dan Respon Pelaksana

Dari sembilan parameter analisis deliberatif, ada satu yang memiliki korelasi paling kuat yaitu prinsip *rule of law* dan *responsiveness*.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Isi kebijakan (*content of policy*) dari kebijakan Alokasi Dana Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang,

analisis deliberatif yang disimpulkan antara lain:

- a. *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Dari sembilan parameter analisis deliberatif, ada tiga yang memiliki korelasi paling kuat yaitu prinsip partisipasi, *consensus orientation*, dan *equity*. Ketiga prinsip tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

- b. Tipe Manfaat.

Dari sembilan parameter analisis deliberatif, ada dua yang memiliki korelasi paling kuat yaitu prinsip partisipasi, efektifitas dan efisien. Pada faktor tersebut kedua prinsip ini belum dilaksanakan dengan baik atau dapat dikatakan lemah.

- c. Derajat Perubahan yang ingin Dicapai

Dari sembilan parameter analisis deliberatif, ada dua yang memiliki korelasi paling kuat yaitu prinsip *responsiveness* dan *strategic vision*. Kedua prinsip

tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Dari sembilan parameter analisis deliberatif, ada empat yang memiliki korelasi paling kuat yaitu prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, dan akuntabilitas. Dari keempat prinsip tersebut yang masih lemah dalam pelaksanaannya adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas.

e. Pelaksana Program

Dari sembilan parameter analisis deliberatif, ada dua yang memiliki korelasi paling kuat yaitu prinsip partisipasi dan *rule of law*. Kedua prinsip tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

f. Sumberdaya yang digunakan

Dari sembilan parameter analisis deliberatif, ada dua yang memiliki korelasi paling kuat yaitu prinsip transparansi, efektivitas dan efisien.

Dari keenam faktor dalam isi kebijakan Alokasi Dana Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang masih ada beberapa prinsip analisis deliberatif yang masih lemah dalam implementasinya dimana seharusnya kriteria tersebut dijalankan dengan baik. Prinsip tersebut antara lain partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Dari ketiga faktor pada lingkungan kebijakan Alokasi Dana Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang prinsip analisis deliberatif telah dilaksanakan dengan baik.

Dari hasil penelitian tersebut, karakteristik analisis deliberatif yang paling dominan mempengaruhi implementasi kebijakan alokasi dana pembangunan sarana dan prasarana wilayah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang adalah prinsip partisipasi. Sedangkan untuk faktor implementasi kebijakan yang paling banyak berkorelasi dengan

karakteristik analisis deliberative ialah letak pengambilan keputusan.

### **Saran**

1. Isi kebijakan (*content of policy*) dari kebijakan Alokasi Dana Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Dari enam faktor pada isi kebijakan terdapat tiga faktor dimana kriteria analisis deliberatifnya masih mengalami kekurangan, antara lain:

- a. Pada tipe manfaat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan masih lemah. Perlu ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap implementasi kebijakan alokasi dana pembangunan sarana dan prasarana wilayah di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengintensifkan peran LPMK untuk turut mengawasi jalannya proses pembangunan.
- b. Prinsip akuntabilitas masih lemah pada faktor letak pengambilan keputusan. Hal yang disarankan oleh peneliti ialah melakukan pemanfaatan media dan proses pelaporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana prasarana kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat sehingga tercipta akuntabilitas yang tidak hanya bersifat internal dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam

forum musrenbangkel dan musrenbangcam.

- c. Prinsip transparansi masih lemah pada faktor letak pengambilan keputusan. Hal yang disarankan oleh peneliti ialah melakukan sosialisasi pada forum musrenbangcam mengenai siapa yang menjadi kontraktor pada pengerjaan pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Pedurungan.
- d. Prinsip transparansi masih lemah terhadap sumberdaya yang digunakan terhadap implementasi kebijakan alokasi dana pembangunan sarana dan prasarana wilayah di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Hal yang dapat dilakukan ialah dengan pengadaan *bill board* atau papan pengumuman yang berisi volume dan bahan bangunan yang digunakan, jumlah anggaran, siapa yang menjadi kontraktor, dan lama waktu pengerjaan proyek.
- e. Prinsip efisiensi masih lemah terhadap sumberdaya yang

digunakan terhadap implementasi kebijakan alokasi dana pembangunan sarana dan prasarana wilayah di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Hal yang disarankan ialah ada upaya standarisasi harga dalam pengerjaan sarana dan prasarana fisik untuk menjamin efisiensi pembangunan sarana dan prasarana wilayah di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

2. Lingkungan implementasi (*context of implementation*) kebijakan Alokasi Dana Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Dari tiga faktor pada lingkungan implementasi kriteria dari analisis deliberative telah dilaksanakan dengan baik. namun demikian, perlu ada peningkatan untuk menjaga konsistensi pada pelaksanaan program berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.

## Peraturan Perundangan:

Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan.